PERSEPSI KEPALA SMA NEGERI TERHADAP PASAL 192 PP NO 17 TAHUN 2010 TENTANG FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh

Nur Rokhim



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016

ABSTRAK

PERSEPSI KEPALA SMA NEGERI TERHADAP PASAL 192 PP NO 17 TAHUN 2010 TENTANG FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Nur Rokhim

Tujuan penelitian ini untuk medeskripsikan persepsi Kepala SMA Negeri terhadap fungsi Dewan Pendidikan di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah 17 responden dan menggunakan sampling jenuh sehingga sampelnya adalah seluruh populasi yang merupakan kepala SMA Negeri di Kota Bandar lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Kepala SMA Negeri terhadap fungsi Dewan Pendidikan di Kota Bandar Lampung adalah negatif. Ini dikarenakan oleh tidak adanya media masa yang dimilki Dewan Pendidikan, kurang dilibatkannya kepala sekolah oleh Dewan Pendidikan Saat menjalankan fungsinya, dan tidak berpengaruhnya Dewan Pendidikan bagi kelancaran pembangunan sekolah.

Kata kunci: dewan pendidikan, fungsi, persepsi kepala sekolah

PERSEPSI KEPALA SMA NEGERI TERHADAP PASAL 192 PP NO 17 TAHUN 2010 TENTANG FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Nur Rokhim

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016 Judul Skripsi

PERSEPSI KEPALA SMA NEGERI TERHADAP PASAL 192 PP NO 17 TAHUN 2010 TENTANG FUNGSI DEWAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Nama Mahasiswa

: Nur Rokhim

Nomor Pokok Mahasiswa: 1213032057

Program Studi

: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan

: Pendidikan IPS

Fakultas

: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Berchah Pitoewas, M.H. NIP 19611214 199303 1 001 Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Drs. Zulkarnain, M.Si.

NIP 19600111 198703 1 001

Ketua Program Studi Pendidikan PKn

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. NF 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Drs. Berchah Pitoewas, M.H.

Sekretaris

: Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.

Penguji Utama

: Drs. Holilulloh, M.Si.

2 Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Muhammad Fuad, M. Hum.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Juli 2016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Nur Rokhim

NPM : 1213032057

Prodi/ Jurusan : PPKn/ Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

Alamat : RT/RW: 016/009, Dusun 5 Desa Rantau Fajar

Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Juli 2016

Nur Bokhim

NPM 1213032057

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Rantau Fajar, pada tanggal 3 Januari 1994, putra pertama pasangan Bapak Kasidi dengan Ibu Sri Wiyati. Penulis menyelesaikan TK pada Tahun 2000 dan melanjutkan di SDN 1 Rantau Fajar lulus Tahun 2006, Madrasah Tsanawiyah

Nurul Huda Rukti Endah Lampung Tengah lulus Tahun 2009, dan Madrasah Aliyah Nurul Huda Rukti Endah Lampung Tengah lulus Tahun 2012. Tahun 2012 tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN tertulis.

Selama Kuliah, penulis tergabung dalam UKM Pramuka, BEM FKIP Unila, Himapis, Ikam Lamtim, anggota panitia Khusus Pemira XIV FKIP Unila. Penulis juga pernah menjadi Kordinator Bidikmisi FKIP 2012, Kordinator ketua angkatan FKIP 2012, dan Komandan Inti Brigade Muda BEM FKIP, Pokja Kerohanian UKM Pramuka Unila, Kepala Dinas Sosial BEM FKIP Unila, Ketua Departemen PSDM Ikam Lamtim, dan Ketua Umum Forum Pendidikan Kewarganegaraan, Wakil Gubernur BEM FKIP Unila, dan sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Lampung Timur.

Pada Tahun 2015 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat dan melaksanakan Praktik Profesi Kependidikan (PPK) di SMPN 3 Pesisir Utara.

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap syukur ke Hadirat Allah SWT

yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya dan Sholawat kepada Nabi Muhammad

SAW, kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan kecintaanku kepada:

Kedua orang tuaku Ayahanda Kasidi dan Ibunda Sri Wiyati
yang sangat kucinta, kusayangi yang selalu berdoa dan bersusah payah demi kesuksesan
anakmu. Terimakasih atas kasih sayang, doa, pengorbanan,
dukungan kalian demi keberhasilanku.

Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah mendewasakanku dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.

MOTTO

"Adapun amal salih adalah sifat yang umum pada setiap perbuatan yang memberi faidah kepada sesama hamba dan negara, dan memberi manfa'at kepada masyarakat baik individu, sekarang dan masa datang"

(Hasyim Asy'ari)

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia"

(Nelson Mandela)

"Hiduplah dengan Ilmu, Iman, dan Cinta"

(Dengan ilmu hidup menjadi lebih mudah, dengan iman hidup menjadi terarah, dan dengan cinta hidup menjadi lebih indah)

(Nur Rokhim)

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Persepsi
Kepala SMA Negeri Terhadap Pasal 192 PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Fungsi Dewan Pendidikan di kota Bandar Lampung". Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, motivasi, dan waktunya untuk memperlancar penyelesaian skripsi ini terutama kepada Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku pembimbing I, dan Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

- Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
- 3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
- 4. Drs. Supriyadi, M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

- Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
- 6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd.,M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan PKn Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
- Bapak Drs. Holilulloh, M.Si., selaku pembahas I terima kasih atas saran dan masukannya;
- 8. Ibu Dayu Rika Perdana, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya;
- 9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan;
- 10. Kedua orang tuaku tercinta dan seluruh keluarga besarku terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan dan semua pengorbanan kalian untukku yang tidak ternilai dari segi apapun;
- 11. Bapak ibu guru terimakasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan sehingga bisa menjadikanku seperti saat ini;
- 12. Bapak Badruzzaman selaku Ketua MKKS SMA Kota Bandar Lampung, kepala SMA negeri se-Bandar Lampung terima kasih untuk kerja sama dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi

- 13. Sahabat-sahabat terbaikku dan yang telah memberikan semangat (Apriyanda Kusuma W, Ridho Hidayat, Pita, Nurma, Anggun, Ucie, Sri, Yuni, Wahyu, Trio, Baidowi, Agung, Jeck, Adi, Irul, Tono, Toni, Abdillah, Novika)
- 14. Teman-teman seperjuanganku di Prodi PPKn angkatan 2012 (Ade, agung, Erika, Anggun N, Ana, Anggi Anggun S, Anis, anton, yanda, Dila, Arista, Ayu A, Ayu N, Baidowi, Bayu Ad, Bayu Ar, Deni, Desi, Dini, Uci, Dwi, Widi, Elly, Eva, Evi, Zahra, Febi, Ferba, Fitra, Hadi, Dova, Idris, melda, Indah, Iqbal, Jeck, Dika, Laeni, Lia, Liana, Lovina, Maria, Maya, Meishya, Mila, Faizal, Putra, Mutiara, Netika, Sesa, Nindi, Adis, Nur, Alliah, rentika, Ricco, Rini, Rio, Yoga, Risma, Roy, Soni, Sekar, Maya, Aini, Tari, Tri, Wita, Yesi, Yolan, Yudista, Yuliana, Zulfikar, Muthia) terima kasih untuk pembelajaraanya.
- 15. Kakak tingkat dan adik tingkat (Kak Fathur, Kak Teki, Kak Muklas, Mba Hani, Kak Viki, Kak Juanda, Kak Made, Mba Elisa, Trio, Azmi, Nita, Siti, Anggi, Rian, Uus, Tikah, Ferdi, dan lainnya), dari angkatan 2009 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang kalian berikan;
- 16. Keluarga besar UKM Pramuka (Erwan, Baidowi, Lilis, Yoga, Temu dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk pembelajaraannya)
- 17. Keluarga Besar BEM FKIP SMSH, Ceres, dan Interest (Kak Arief, Kak Akbar, Kak Sani, Kak Badri, Kak Yudi, Kak Karsiwan, Kak Andi, Kak Naim, The Ina, Mba Lisa, mba Nisa, Mba Okti, Mba Nani, Umi, Herwin, Dani, Meta, Kak Deni, Kak Hizlan, Mba Pus, Mba Fadilla, Hendri, Anjar, Aryan,

selvy, Agung, Marutha, Jeck, Yona, Reza, devi, deris, Nina, Ning, Titi, Mba Pus, Ummu), dan Untuk Keluarga Besar Kabinet PROGRESIF (Risko, Yeti, Tyas, Riya, Fuad, Linda, Trio, Nuy, Hening, Linda Nur, Agung, Kartika, Ari, Diyan, Cahyono, Vivi, Rizal, Avivah, Maulana, Ridha) terima kasih untuk motivasi dan bantuannya;

- 18. Keluarga besar Forum Pendidikan Kewarganegaraan yang telah membentuk pribadi saya menjadi lebih bertanggung jawab dan membuat saya banyak belajar arti kerja Ikhlas tanpa batas;
- 19. Keluarga Besar Ikam Lamtim (Kak Isna, Mba Eva, Mba Santi, Rika, Sofyan, Dedi, Ambar, Adi, Ikhwan, Eza, Andri, Yekti, Wahyu, Fitri, dan Semua Punggawa ikam lamtim) terima kasih untuk kebersamaan dan pembelajarannya
- 20. Teman-teman KKN dan PPL (Pandu, Yosua, Adel, Shinta, Oca, Ugi, Teguh, Erli, Ria) terima kasih atas saran, serta motivasinya yang selalu kalian berikan kepadaku;
- 21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

На	lamaı
COVER	i
ABSTRAK	
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
PERSEMBAHAN	
MOTTO	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	
C. Pembatasan Masalah	
D. Perumusan Masalah	
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1.Tujuan Penelitian	
2.Kegunaan Penelitian	
a. Kegunaan Teoritis	
b. Kegunaan Praktis	
F. Ruang Lingkup Penelitian	8
1. Ruang Lingkup Ilmu	8
2. Subjek Penelitian	9
3. Objek Penelitian	9
4. Tempat Penelitian	9
5. Waktu Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritis	10
1. Pengertian Persensi	10

	2. Faktor-faktor dalam Persepsi	11
	3. Proses Terjadinya Persepsi	13
	4. Tinjauan tentang Pendidikan dan sekolah	14
	5. Pengertian Kepala Sekolah	15
	6. Kompetensi Kepala Sekolah	16
	7. Sejarah PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan	dan
	Penyelenggaraan Pendidikan	19
	8. Pengertian dan Fungsi Dewan Pendidikan	21
B.	Penelitian Yang Relevan	23
C.	Kerangka Pikir	24
D / D :	WALLEST OF DEVELOPE AND A NAME OF THE PARTY	
	III METODELOGI PENELITIAN Metode Penelitian	25
	Populasi dan Sampel	25
ъ.	1. Populasi	25
	2. Sampel	25
C	Variabel Penelitian	26
C.	1. Variabel Bebas	26
	2. Variabel Terikat	26
D.	Definisi Konseptual	26
	Definisi Operasional	26
F.		27
G.	Teknik Pengumpulan Data	28
	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	29
	1. Uji Validitas	29
	2. Uji Reliabilitas	29
I.	Teknik Analisis Data	31
	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A.	Langkah-langkah Penelitian	32
	Persiapan Pengajuan Judul Pengajitian pendahuluan	32
	2. Penelitian pendahuluan	32
	 Pengajuan Rencana Penelitian Pelaksanaan Penelitian 	33
		33
D	5. Pelaksanaan Uji Coba Angket	34
	Gambaran Lokasi Penelitian	37 39
C.	Deskripsi Data	
	1. Pengumpulan Data	39
	2. Penyajian Data	39
	a. Persepsi Kepala SMA Negeri terhadap Fungsi Dewan Pendidik	
	dengan Indikator Pengetahuan	39

b. Persepsi Kepala SMA Negeri terhadap Fungsi Dewan Pen		can	
		dengan Indikator Tanggapan	42
	c.	Persepsi Kepala SMA Negeri terhadap Fungsi Dewan Pendidik	can
		dengan Indikator Harapan	44
	d.	Penyajian Data Persepsi Kepala SMA Negeri terhadap Fungsi	
		Dewan Pendidikan di Kota Bandar Lampung	47
D.	Pemba	hasan	50
	1. In	dikator Pengetahuan	52
,	2. In	dikator Tanggapan	53
•	3. In	dikator Harapan	55
4	4. Pe	ersepsi kepala SMA Negeri terhadap Fungsi Dewan Pendidikan	57
BAB V	KESI	MPULAN DAN SARAN	
		pulan	66
R	Saran		67

DAFTAR TEBEL

Tabel 2.1	Pengurus dan Anggota Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung Periode 2011-2016
Tabel 4.1	Hasil Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden untuk Item Ganjil (X)
Tabel 4.2	Hasil Uji Coba Angket 10 Orang di Luar Responden untuk Item Genap (Y)
Tabel 4.3	Distribusi Antara Item Soal Kelompok Ganjil (X) dengan Kelompok Soal Genap (Y)
Tabel 4.4	Data Lokasi SMA Negeri di Kota Bandar Lampung37
Tabel 4.5	Daftar Nama Kepala Sekolah Negeri di Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015
Tabel 4.6	Distribusi skor angket Persepsi Kepala SMA Negeri terhadap Fungsi Dewan Pendidikan dengan Indikator Pengetahuan
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Persepsi Kepala SMA Negeri terhadap Fungsi Dewan Pendidikan dengan Indikator Pengetahuan41
Tabel 4.8	Distribusi skor angket Persepsi Kepala SMA Negeri terhadap Fungsi Dewan Pendidikan dengan Indikator Tangapan42
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Persepsi Kepala SMA Negeri tentang Fungsi Dewan Pendidikan dengan Indikator Tanggapan44
Tabel 4.10	Distribusi skor angket Persepsi Kepala SMA Negeri terhadap Fungsi Dewan Pendidikan dengan Indikator Harapan45
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Persepsi Kepala SMA Negeri terhadap Fungsi Dewan Pendidikan dengan Indikator Harapan46
Tabel 4.12	Distribusi Skor Angket Persepsi Kepala SMA Negeri terhadap Fungsi Dewan Pendidikan di Kota Bandar lampung47

Tabel 4.13	Distribusi Frekuensi Persepsi Kepala SMA Negeri terhadap Fungs	si
	Dewan Pendidikan di Kota Bandar lampung	.49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Proses Terjadinya Persepsi	13
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir.	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- Surat Keterangan Judul Skripsi dari Wakil Dekan Bidang Akademiik dan Kerja Sama
- 2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
- 3. Surat Balasan Penelitian Pendahuluan
- 4. Surat Izin Penelitian
- 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- 6. Kisi-Kisi Angket
- 7. Angket Penelitian

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Terlebih di Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang di dunia dan memiliki harapan tinggi akan peran bidang pendidikan. Diharapkan melalui pendidikan akan terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dilingkungan global.

Kebutuhan akan pendidikan harus dipenuhi demi terciptanya kecerdasan hidup bangsa yang tentunya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial...".

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal mencerdaskan anak bangsa adalah tanggung jawabsemua warga. namun apabila berbicara pendidikan, hal pertama yang terlintas adalah sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal berlandaskan kurikulum. Di dalam

lembaga pendidikan formal ada tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. tenaga profesional tersebut disebut dengan guru. Kaitannya dengan guru, ada guru yang memiliki tanggung jawab lebih, yakni kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan personil sekolah yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan sekolah baik secara akademis, segala kegiatan, dan keadaan lingkungan sekolah serta hubungan dengan masyarakat menurut Daryanto (1996:81).

Perkembangan sistem yang ada di Indonesia menjadikan Perubahan pengelolaan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi. Hal ini membuat adanya pergeseran agar tercipta kemandirian bidang pendidikan terutama di sekolah. Dampak dari hal ini adalah adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam MBS sekolah diberikan kewenangan untuk rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari MBS ini menjadikan tugas dan tanggung jawab sekolah semakin besar. Menurut Mulyasa, (2012:126) "Kepala sekolah harus mampu memberdayakan semua sumber daya sekolah". Pemberdayaan ini berlaku untuk pendidik dan peserta didik.

Kepala sekolah harus mampu memberikan fasilitas kepada guru untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan dan keterampilan. Selain sebagai manajer internal kepala sekolah harus peka terhadap perkembangan yang terjadi di dalam pendidikan termasuk tentang kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan Pendidikan di Indonesia, Sebagaimana kita ketahui bersama amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi "Negara Memprioritaskan Anggaran Pendidikan Yang Sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional."

Selain ini terdapat kebijakan lain dari pemerintah untuk pendidikan diantaranya dikeluarkannya PP Nomor 17 Tahun 2010. Dalam PP ini diatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam Pasal 192 PP Nomor 17 Tahun 2010 diatur mengenai Dewan Pendidikan. Dewan Pendidikan merupakan wujud dari pelaksanaan Otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Dalam praktik desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk dapat meningkatkan peran serta dalam pengelolaan pendidikan Terfokus pada ayat (2) diterangkan bahwa Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang menurut PP Nomor 17 Tahun 2010. Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari pakar pendidikan; penyelenggara pendidikan; pengusaha; organisasi profesi; pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya; dan pendidikan bertaraf internasional; pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan.

Lebih jelas Dewan Pendidikan secara umum memiliki fungsi:

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

- Melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD
- e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Dewan Pendidikan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Proses pembentukan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan memerlukan program sosialisasi dengan perencanaan yang matang.

Akan tetapi, adanya Dewan Pendidikan belum dirasakan oleh setiap sekolah, Dewan Pendidikan hanya sekedar formalitas maksudnya pengurus, sekretariat, dan landasan hukum jelas, namun secara kenyataan terhadap aplikasi di lapangan belum terlalu terlihat. Dalam observasi awal juga ditemukan beberapa fakta mengenai Dewan Pendidikan khususnya Dewan Pandidikan Kota Bandarlampung. Di sekretariat yang terletak satu lingkungan SD N Kebon jahe itu tampak lusuh dan tampak sudah lama tidak digunakan. Bahkan secara media sangat sedikit pemberitaan mengenai Dewan Pendidikan terutama di Bandar

Lampung baik itu kegiatan maupun prestasi. Dewan Pendidikan dalam perjalanannya memanglah harus tetap ada pengawas atau pengontol, kaitannya dengan kerja, Dewan Pendidikan bermitra dengan komite sekolah. Komite setiap sekolah pastilah berhubungan erat dengan Kepala Sekolah. Mengenai fungsi yang ada tentang Dewan Pendidikan yang berkaitan dengan kepala sekolah adalah fungsi Dewan Pendidikan dalam Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan; Menampung, menganalisis, dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pendidikan; Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Akan tetapi fungsi ini belum berjalan maksimal.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu kepala sekolah diketahui bahwa Dewan Pendidikan dalam melibatkan komite sekolah intensitasnya sangat sedikit. Dewan Pendidikan yang seharusnya menjadi media dalam penjaringan aspirasi masyarakat terkait pendidikan, namun fungsi ini jelas tidak maksimal, apabila kita melihat fakta yang terjadi di lapangan. Bagaimana masyarakat mau menyampaikan aspirasinya ketika anggota Dewan Pendidikan sendiri jarang terlihat melakukan aktifitas di sekretariat. Terlebih banyak masyarakat belum mengetahui apa itu Dewan Pendidikan. Aspirasi ini sangatlah penting untuk mengetahui keadaan di lapangan dan apa yang terjadi dengan pendidikan.

Seharusnya melalui perkembangan teknologi (media) yang ada saat ini bisa digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat. Terlepas dari fakta yang ada tentang Dewan Pendidikan di Kota Bandar lampung, melalui konsep dan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah, Dewan Pendidikan diharapkan mampu

meningkatkan kinerja pengelolaan pendidikan di sekolah, sehingga mutu pendidikan menjadi optimal. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti persepsi kepala SMA Negeri terhadap Pasal 192 PP nomor 17 Tahun 2010 tentang Fungsi Dewan Pendidikan di Kota Bandar Lampung tahun 2016.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka didapatkan suatu identifikasi masalah sebagai berikut:

- Keadaan sekretariat Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung yang lusuh seperti tidak digunakan
- Adanya Dewan Pendidikan hanya sekedar formalitas, ada (Sruktur dan Pengurus) namun tidak terlihat nyata kerjanya
- Banyak kalangan yang tidak mengetahui apa itu Dewan Pendidikan karena
 Minimnya pemanfaatan media oleh Dewan Pendidikan
- 4. Minimnya akses informasi Dewan Pendidikan sehingga masyarakat sulit dalam menyampaikan aspirasi kepada Dewan Pendidikan
- Pesepsi kepala sekolah bahwa Dewan Pendidikan kurang menjalankan fungsinya secara optimal

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, Penelitian ini dibatasi pada persepsi kepala SMA Negeri terhadap Pasal 192 PP nomor 17 Tahun 2010 tentang Fungsi Dewan Pendidikan di Kota Bandar Lampung tahun 2016 yang meliputi fungsi Dewan Pendidikan dalam:

- 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan
- Menampung, menganalisis, dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pendidikan
- 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan

D. Perumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah Bagaimanakah persepsi kepala SMA Negeri terhadap Pasal 192 PP nomor 17 Tahun 2010 tentang Fungsi Dewan Pendidikan di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Kepala SMA Negeri Tentang Fungsi Dewan Pendidikan Menurut Pasal 192 PP Nomor 17 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritik mengembangkan konsep Pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kajian Otonomi Daerah yang membahas tentang penerapan peraturan Pemerintah di lingkungan Pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang melibatkan masyarakat serta penerapan PP Nomor 17 Tahun 2010.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah contoh kesesuaian desentralisasi pendidikan di kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Pasal 192 PP Nomor 17 Tahun 2010, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Serta untuk mengoptimalkan kepala sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan disekolahnya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan untuk memajukan pendidikan Indonesia dengan memaksimalkan fungsi Dewan Pendidikan terkhusus tingkat Kota Bandar Lampung berdasarkan Pasal 192 PP Nomor 17 tahun 2010 dan sebagai evaluasi pelaksanaan Dewan Pendidikan.

3. Bagi Peneliti

Agar peneliti sendiri lebih paham tentang peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dalam bidang pendidikan, terutama terkait Pasal 192 PP Nomor 17 Tahun 2010. Dan mengetahui persepsi kepala sekolah tentang Peraturan ini.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Penerapan Otonomi Daerah karena berkaitan tentang penerapan system pemerintahan daerah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945. Selain itu juga penelitian ini merupakan materi kelas XI tentang pelaksanaan otonomi daerah.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah di SMA Negeri Se-Kota Bandar Lampung.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah persepsi kepala sekolah terhadap penerapan Pasal 192 PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Fungsi Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung.

4. Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri se-Kota Bandar Lampung.

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Tanggal 18 November 2015 dengan nomor: 7857/UN26/3/PL/2015 sampai dengan Tanggal 22 April 2016 dengan nomor: 31/MKKS/SMA/IV/2016.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Persepsi

Persepsi secara umum bisa diartikan pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seeseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Menurut Walgito (2010:99) "Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut juga proses sensoris". Menurut Sarwono (1992:45) "Jika pengindraan disatukan dan dikordinasikan di dalam pusat syaraf yang lebih tinggi sehingga manusia bisa mengenali objek-objek maka keadaan ini dinamakan persepsi".

Menurut Sunaryo (2004:93) "Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra kemudian individu ada perhatian lalu diteruskan ke otak kemudian individu menyadari bahwa itu adalah persepsi". Sedangkan dari sumber tersebut dapat dartikan bahwa persepsi itu ada karena adanya penangkapan objek-objek oleh indera-indera.

Dua Teori yang yang berkaitan dengan persepsi yaitu teori elemen, dan teori gesalt. Menurut teori elemen dalam individu mempersepsi sesuatu maka yang

mulanya dipersepsi adalah bagian-bagiannya kemudian keseluruhan. Sedangkan menurut teori Gestalt "yang menjadi bagian primer adalah bagian-bagiannya, sedangkan keseluruhan merupakan bagian skunder" (Walgito 2010:105).

Kedua teori tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu, dalam teori elemen apabila ada seseorang maka yang dipersepsi terlebih dahulu adalah bagian-bagiannya kemudian begian keseluruhan. Hal hal kacil akan lebih dahulu dipersepsi dibandingkan dengan keseluruhan. Berbeda dengan teori Gesel, dalam teori Gestalt yang telebih dahulu dipersepsi adalah keseluruhannya.

Didalam persepsi terdapat pengetahuan, tanggapan, dan harapan. Menurut Notoatmodjo (2007), "pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu". Hal yang terdapat dalam persepsi selanjutnya yakni tanggapan. Menurut Sri Hilmi P dan Rahesli Humsona dalam Junsu (2008:21) "tanggapan seseorang terhadap stimulus yang dihadapinya, yang terjadi setelah memberikan persepsi terhadapnya menunjukkan adanya aktivitas merasakan, menginterpretasikan dan memahami objek-objek baik fisik maupun sosial". Hal terakhir yang terdapat dalam persepsi yaitu haparan. Menurut Sarwono (2009:90) "yang mempengaruhi persepsi salah satunya adalah set. Set yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul".

2. Faktor-Faktor dalam Persepsi

Secara umum, Sunaryo (2004:94) mengemukakan bahwa "persepsi memiliki dua macam, yaitu *External perception* dan *self-perception*. *External perception*

ialah persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan dari luar diri individu Persepsi itu terjadi bukan seketika, sedangkan *self-perception* ialah persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan dari dalam diri individu". Ada hal yang menyebabkan adanya suatu persepsi. Hal terpenting dalam persepsi yaitu adanya stimulus. Berkaitan denga ini ada beberapa Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi menurut Walgito (2010:101), yaitu:

1. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus ini bisa berasal dari dalam maupun dari luar individu.

2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Selain itu harus ada sayaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus, yaitu otak.

3. Perhatian

Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Sedangkan menurut Sarwono (2009:90) yang mempengaruhi persepsi adalah:

1. Perhatian

Biasanya seseorang akan memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja.

2. Set

Yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul.

3. Kebutuhan

Salah satu aspek psikologis yang menggerakkan mahluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) bagi setiap individu untuk berusaha

4. Sistem Nilai

Sisem nilai berisi aturan yang memberikan petunjuk yang telah disepakati.

5. Ciri Kepribadian

Kepribadian merupakan keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain

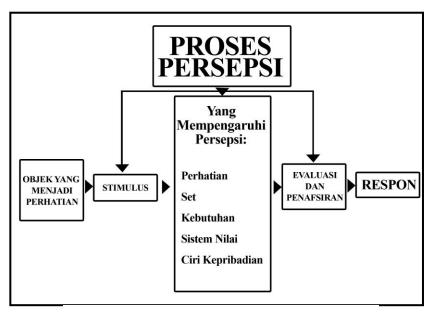
Dalam aplikasinya terlihat jelas bahwa persepsi bisa berasal dari diri sendiri maupun dari luar. Dari faktor-faktor diatas, dapat dimengerti bahwa untuk mengadakan suatu persepsi ada tiga faktor yang berperan baik dari objek yang dipersepsi, alat dan syaraf yang merupakan syarat fisiologis, dan perhatian merupakan syarat psikologis berupa perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Persepsi juga dipengaruhi oleh perhatian, set, kebutuhan, sistem nilai dan ciri kepribadian. Perbedaan setiap pengaruh ini baik itu perhatian, set, kebutuhan, sistem nila, dan ciri kepribadian akan mempengaruhi persepsi.

3. Proses terjadinya Persepsi

Walgito (2010:102) mengemukakan proses-proses terjadinya persepsi:

"1) Suatu obyek atau sasaran menimbulkan stimulus, selanjutnya stimulus tersebut ditangkap oleh alat indera. 2) Stimulus suatu obyek yang diterima oleh alat indera, kemudian disalurkan ke otak melalui syaraf sensoris. dan 3) Otak selanjutnya memproses stimulus hingga individu menyadari obyek yang diterima oleh alat inderanya. Dalam hal ini terjadilah adanya proses persepsi yaitu suatu proses di mana individu mengetahui dan menyadari suatu obyek berdasarkan stimulus yang mengenai alat inderanya".

Pemaparan diatas dapat diperjelas sebagai berikut:



Gambar 2.1 Proses Terjadinya Persepsi

Dalam gambar terlihat bahwa Individu menerima bermacam -macam stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam. Akan tetapi tidak semua stimulus tersebut diterima dan menjadi respon, Dan faktor-faktor lah yang mempengaruhi apakah stimulus yang datang diterima menjadi respon.

4. Tinjauan tentang Pendidikan dan Sekolah

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara". Menurut Haenilah (2008:2) "Pendidikan adalah interaksi antara Pendidik dengan Peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai target atau tujuan-tujuan pendidikan. Menurut Imtima (2007:20) "pendidikan adalah proses membimbing manusia dari proses kegelapan menuju pencerahan pengetahuan, pendidikan meliputi segala hal memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri dan dunia tempat mereka hidup".

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan suatu cara untuk menjadikan seseorang dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidak pahaman menjadi paham. Dalam pendidikan tentulah ada hal yang terpenting, yaitu adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Semakin baik interaksi yang dijalankan, maka akan semakin cepat target dari tujuan pendidikan tersebut tercapai. Target pendidikan akan mudah tercapai apabila ada sarana dalam interaksi. Salah satu sarana tersebut yakni sekolah. Menurut Pora (2004:15) "sekolah berasal dari bahasa latin *skhole,scola, scolae* yang berarti waktu luang. Menurut Khrisnamukti dalam Pora (2004:16) "Waktu

luang atau senggang inilah batin mungkin belajar, tidak hanya sains, sejarah, matematik, namun juga belajar tentang dirinya sendiri".

Pengertian sekolah sendiri adalah suatu lembaga yang memang dirancang khusus untuk pengajaran para murid di bawah pengawasan para guru. Sekolah adalah tempat didikan bagi anak anak bertujuan mengajarkan anak untuk menjadi anak yang mampu memajukan bangsa. Sekolah merupakan Pendidikan formal yang memiliki jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Fokus sekolah dalam penelitian ini adalah adalah Sekolah Menengah Atas. Sekolah Menengah Atas adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Pelajar SMA umumnya berusia 16 sampai dengan 18 tahun.

5. Pengertian Kepala Sekolah

Secara arti kata, kepala sekolah memiliki dua arti yaitu kepala dan sekolah. Kepala mempunyai arti pimpinan suatu lembaga atau organisasi. Selanjutnya sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 dinyatakan bahwa:

"Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB),

sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI)".

Artinya kepala sekolah sendiri merupakan guru yang diberikan tugas lebih karena dia memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. Menurut Rahman dkk (2006: 106) "Kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan *structural* (kepala sekolah) di sekolah". Menurut Daryanto (1996:81) "Kepala sekolah merupakan personil sekolah yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan sekolah baik secara akademis, segala kegiatan, dan keadaan lingkungan sekolah serta hubungan dengan masyarakat".

Untuk mencapai mutu sekolah yang efektif, kepala sekolah dan seluruh stakeholders harus bekerjasama dengan penuh kekompakan dalam segala hal. Pimpinan sekolah yang berhasil adalah yang mampu menampilkan dirinya sebagai model diri yang berkembang, menjadi teladan bagi guru, siswa dan yang lainnya serta mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan perubahan. Karena bagaimanapun yang terjadi dengan lembaga, baik buruknya lembaga, kepala sekolah lah yang bertanggung jawab.

6. Kompetensi Kepala Sekolah

Sudah kita ketahui bersama bahwa kepala sekolah memiliki peran sentral dalam perkembangan dan kemajuan sekolah. Iklim sekolah harus tetap terjaga keharmonisan baik internal sekolah maupun terhadap masyarakat secara umum. Menurut Saleh dan Amirin dalam Daryanto (2006:81) Kepala Sekolah

sebagai seorang pemimpin memiliki fungsi: Perumus tujua kerja dan pembuat kebijaksanaan (policy); Pengatur tata kerja sekolah; dan Pensupervisi kegiatan.

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin, berfungsi mengatur tata kerja sekolah yang meliputi pembagian tugas dan wewenang, mengatur petugas pelaksana baik itu bagian kesiswaan maupun akademik, dan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pendidikan. Selanjutnya sebagai supervise kegiatan kepala sekolah berfungsi mengaawasi dan mengarahkan demi kelancaran kegiatan, mengevaluasi kegiatan demi perbaikan kinerja struktur, dan membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksana. Dengan fungsi ini semakin jelas bahwa kepala sekolah bukanlah struktur yang hanya bersifat bagaimana menjadi seorang pemimpin bukan bersikap layaknya seorang bos.

Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah dalam melakukan kinerja melalui Perencanaan; Pengorganisasian; Pengarahan; tahapan-tahapan, yaitu: Pengkordinasian; dan Pengawasan. Dalam tahapan perencanaan, kepala sekolah mendefinisikan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi. Tahap ini sangatlah penting karena kematangan dan kelancaran suatu lembaga dalam mencapai visi yang maksimal didukung oleh perencanaan yang maksimal pula. Tahapan selanjutnya yaitu pengorganisasian, yang merupakan proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Hasil dari pengorganisasian ini adalah terbentuknya struktur. Tahapan yang ketiga yaitu kepala sekolah membimbing dan menggerakkan struktur yang ada agar bekerja sesuai dengan visi, misi, dan tujuan lembaga. Tahapan selanjutnya yang dilakukan kepala sekolah sebagai

seorang pemimpin ialah Memadukan tujuan dan aktivitas dari berbagai bagian untuk mencapai hasil yang efisien. Tahapan yang terakhir ialah pengawasan. Setelah system dan struktur sudah dibentuk perlu diarahkan ke arah tercapainya tujuan atau sasaran manajemen. Dalam hal ini kepala sekolah juga bisa membandingkan fakta terhadap kegiatan yang berlangsung dengan standar tujuan lembaga serta mengambil tindakan koreksi demi tercapainya efektifitas dan efisiensi sumber daya yang dimiliki. Inti dari setiap tahapan bagaimana kepala sekolah/pemimpin dapat melakukannya dengan bijaksana sehingga semua yang terlibat dalam tahapan ini tidak merasa disuruh, akan tetapi diajak untuk kebaikan bersama.

Untuk melaksanakan tahapan tersebut, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus memiliki keterampilan. Menurut Davis dalam Effendy "keterampilan ada 3 dan saling berkaitan, yaitu: keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, dan keterampilan konseptual". Lebih lanjut Effendi (1989:176) mendefinisikan keterampilan yaitu:

a. Keterampilan teknis (*Technical skill*)

Ketrampilan teknis menunjukkan sesorang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam setiap jenis proses atau teknik. Keterampilan ini lebih menjurus ke turun langsung atau bertindak.

b. Keterampilan manusiawi (human skill)

Ketrampilan ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin mampu untuk bekerja sama dengan orang lain secara efektif dan efisien dan untuk membina kerja sama. Dalam era yang seperti ini, ketrampilan manusiawi sangat membantu untuk membangun jaringan. Karena semakin banyak jaringan yang dimiliki, maka akan semakin mudah seorang pemimpin mengembangkan lembaganya.

c. Keterampilan konseptual

Sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk berpikir dalam istilah yang berkaitan dengan perencanaan jangka panjang, kerangka kerja, dan modal. kamatangan dan kelancaran suatu lembaga dalam mencapai visi yang maksimal didukung oleh konsep yang matang.

Meskipun memiliki definisi berbeda, ketiga keterampilan tersebut saling berkaitan yang mana sebagai seorang pemimpin haruslah memiliki keterampilan teknik. Ketika struktur yang ada dibawahnya yang belum berjalan maksimal, pemimpin bisa bertindak atau turun tangan mengatasinya. Setelah teknik dikuasai, pemimpin harus pandai membangun kerja sama dengan pihak luar yang terkait dengan lembaganya. Dengan jaringan yang dimiliki, maka akan mempermudah lembaga dalam melakukan gerakan yang bertujuan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Yang tidak kalah penting dari seorang pemimpin ialah mampu membuat konsep dan perencanaan yang baik sehingga setiap elemen yang terlibat memiliki acuan dalam melaksanakan setiap tugasnya. Dengan adanya strategi yang matang tidak akan sulit untuk kepala sekolah dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin.

7. Sejarah PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah ini dibuat sebagai wujud dari pelaksanaan Otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Dalam praktik desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk dapat meningkatkan peran serta dalam pengelolaan pendidikan. Upaya agar hal tersebut bisa terealisasi adalah dengan adanya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000–2004.

Hal-hal yang bersifat umum dalam UU ini dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. rintisan sosialisasi pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di Propinsi Sumatera Barat, Bali, dan Jawa Timur masing-masing satu kabupaten/kota dilakukan pemerintah pada tahun 2001. Kemudian setelah rintisan ini ada beberapa daerah yang membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atas inisiatif daerah masing-masing. Dasar hukum dalam dalam Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
 Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
 Pembangunan Nasional
- d. (Propenas) 2000 2004.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
 Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
 Nomor 12. 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan
 Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan
 Dasar dan Menengah.
- i. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- j. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- k. PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan
 Penyelenggaraan Pendidikan.

8. Pengertian dan Fungsi Dewan Pendidikan

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan komite sekolah "Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/ kota". Menurut PP Nomor 17 Tahun 2010 "Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan".

Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/Kota. Ada beberapa asumsi pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah (Panduan Umum Dewan Pendidikan). Dewan Pendidikan adalah badan yang beranggotakan berbagai lapisan masyarakat yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota. Seperti halnya pengurus Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung yang beranggotakan oleh beberapa lapisan masyarakat. Berikut tabel Pengurus dan Anggota Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung:

Tabel 2.1 Pengurus dan Anggota Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung Periode 2011-2016

Dewan Pakar:	Ketua:	Anggota:
1. Prof. Dr. Sunarto, S.H.,	Dr. Mustafa Usman,	1. Dr. Undang Rosidin,
M.H	M.A.	M.Pd.
2. Dr. M. Khadafi, S.H., M.H.		2. Dr. Syarifudin Dahlan,
3. Dr. Kuswandi, S.P., J.P.	Sekretaris:	M.Pd.
	Drs. Suwandi Umar	3. Drs. Suharman, M.Pd
		4. Dr. Hj. Darlena Suri, M.M.
		5. Drs. Adlis Andri
		6. Drs. H. Suyitno
		7. Dra. Maryeni Nurteja,
		M.H.
		8. Drs. H. Sartono

Sumber: Sekretariat Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung

Ada beberapa asumsi pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah. Menurut Pasal 192 PP Nomor 17 Tahun 2010 "Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan

pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan". Fungsi lebih rinci Dewan Pendidikan sebagai berikut:

- Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- Melakukan kerja sama dengan masyarakat pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

B. Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian yang relevan dalam penelitian ini baik tingkat lokal maupun nasional yaitu:

- Persepsi Kepala Sekolah terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 oleh Viki Septian
- 2. Peran Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan oleh Hendarman

C. Kerangka Pikir

Setiap respon yang datang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor. Jika kita melihat proses terjadinya persepsi, sebelum individu tersebut memiliki respon tehadap suatu hal, akan ada proses yang dinamakan dengan evaluasi dan penafsiran termasuk penasiran tentang Dewan pendidikan. Dewan Pendidikan merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan kepedulian terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Akan tetapi, pelaksananannya masih hanya sekedar sebagai formalitas Pendidikan. Termasuk belum terlalu dirasakannya peran dan fungsi Dewan Pendidikan Kota Bandarlampung menurut beberapa kepala Sekolah. Dengan demikian, untuk mengetahui gambaran bagaimana Persepsi Kepala SMA Negeri tentang Fungsi Dewan Pendidikan Menurut PP Nomor 17 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung, adalah sebagai Berikut:

Persepsi Kepala Sekolah (X) Indikator:

- 1. Pengetahuan (knowledge)
- 2. Penilaian (evaluation)
- 3. Harapan (expectations)

Fungsi Dewan Pendidikan (Y)

Indikator:

- 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- 2. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Menurut Hamdi dan Bahrudin (2014:2) "Penelitian deskriptif ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada". Tujuan penelitian deskriptif ialah menjelaskan secara akurat dan menggambarkan mekanisme sebuah proses. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan Persepsi Kepala SMA Negeri Tentang Fungsi Dewan Pendidikan Menurut Pasal 192 PP Nomor 17 Tahun 2010 di Kota Bandar Lampung.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2010:117) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Obyek/ Subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi dalam Penelitian ini yakni Kepala SMA Negeri di Bandar Lampung yang berjumlah 17 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik dalam populasi yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi atau sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2010:125) "sampling jenuh adalah teknik penentuan

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini dilakukan apabila jumlah polulasi relatif kecil kurang dari 30". Maka, dalam sampel penelitian ini adalah 17 kepala SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam Penelitian ini adalah Persepsi Kepala SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Fungsi Dewan Pendidikan menurut Pasal 192 PP Nomor 17 Tahun 2010.

D. Definisi Konseptual

Persepsi kepala SMA Negeri tentang fungsi Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung merupakan pengetahuan, tanggapan, dan harapan kepala SMA Negeri se-Bandar Lampung terhadap kenyataan di lapangan mengenai fungsi Dewan Pendidikan berdasarkan informasi, data dan pengalaman. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota sendiri berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten/kota.

E. Definisi Operasional

1. Persepsi Kepala Sekolah

Persepsi itu ada karena adanya penangkapan objek-objek oleh indera-indera seperti indera penglihatan,indera pendengaran, indera pengecap dan indera

pengatur. Persepsi Kepala Sekolah adalah penilaian Kepala sekolah terhadap fungsi Dewan Pendidikan di Kota Bandar Lampung. dalam Persepsi terdapat pengetahuan, penilaian, dan harapan.

2. Fungsi Dewan Pendidikan Menurut Pasal 192 PP Nomor 17 Tahun 2010

Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota berfungsi meningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan padaka bupaten/kota. Fungsi yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan
- Menampung, menganalisis, dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pendidikan
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

F. Rencana Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengetahuan kepala sekolah terhadap Fungsi Dewan Pendidikan di Kota Bandar Lampung yaitu dengan Indikator tahu, kurang tahu, dan tidak tahu.
- Tanggapan kepala sekolah terhadap Fungsi Dewan Pendidikan di Kota Bandar
 Lampung yaitu dengan indikator setuju, kurang setuju, dan tidak setuju.
- c. Harapan kepala sekolah terhadap Fungsi Dewan di Kota Bandar Lampung yaitu dengan indikator perlu, kurang perlu, dan tidak perlu.

d. Pengukuran persepsi kepala sekolah terhadap Fungsi Dewan di Kota Bandar Lampung yaitu dengan indikator Baik, Kurang baik, dan Tidak baik.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, dipergunakan berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu teknik pokok dan teknik penunjang.

1. Teknik Pokok

a. Angket

Teknik angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan maksud mendapatkan data dan informasi langsung dari responden. Sasaran angket adalah seluruh kepala SMA Negeri se-Bandar Lampung. Responden memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan subjek. Setiap item memiliki tiga alternatif jawaban yang masing-masing mempunyai skor bobot yang berbeda, yaitu:

- 1. Alternatif jawaban yang mendukung diberi skor 3
- 2. Alternatif jawaban yang cukup mendukung diberi skor 2
- 3. Alternatif jawaban yang tidak mendukung diberi skor 1

2. Teknik Penunjang

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung pada objek peniliti yang dirasakan perlu untuk menunjang data penelitian. Wawancara dilakukan kepada anggota Dewan Pendidikan Kota

Bandarlampung dan kepala sekolah untuk mengetahui persepsi Kepala SMA Negeri tentang fungsi Dewan Pendidikan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu suatu pengambilan data yang diperoleh dari informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan-keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh meliputi struktur dan nama-nama anggota Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung di sekretariat Dewan Pendidikan Kota Bandar Lampung.

H. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2010:211) "validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen". Semakin tinggi validitas suatu instrumen maka semakin valid instrumen tersebut, begitupun sebaliknya. Untuk menentukan *valisitas item* dalam penelitian ini dilakukan kontrol langsung soal terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator yang dipakai. Validitas yang digunakan yakni *logical validity* dengan cara *judgment* yaitu dengan mengkonsultasikan kepada beberapa ahli penelitian dan tenaga pengajar di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Unila.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas angket dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menyebar Angket untuk diuji cobakan kepada 10 orang diluar responden.

- Untuk reliabilitas soal angket digunakan teknik belah dua, yaitu ganjil/genap.
- c. Selanjutnya mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan korelasi

 Product Moment yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N\Sigma xy - (\Sigma x) (\Sigma y)}{\sqrt{\{N\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2\} \{n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2\}}}$$

Keterangan:

r xy = Koefisien kolerasi antara gelaja x dan y

x = Variabel bebas

y = Variabel Terikat

N = Jumlah Sampel

(Arikunto, 2010: 213)

d. Untuk menentukan reliabilitas angket digunakan rumus *Sperman Brown*, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + r_{gg}}$$

Keterangan:

r xy: Koefisien reliabilitas seluruh tes

r gg: Koefisien korelasi item x dan y

e. Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas sebagai berikut:

0.90 - 1.00 =Reliabilitas tinggi.

0.50 - 0.89 =Reliabilitas sedang.

0.00 - 0.49 = Reliabilitas rendah.

I. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data akan digunakan teknik analisis data dengan menggunakan rumus Interval adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I : Interval

NT: Nilai tertinggi

NR: Nilai terendah

K: Jumlah kategori

Kemudian untuk mengelolah data dan menganalisis data serta mengetahui tingkat kebenaran responden, digunakan rumus persentase berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P= Besarnya presentase

F = Jumlah skor yang di peroleh item

N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Untuk mendefinisikan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut:

$$56\% - 75\% = Sedang$$

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan analisis ketiga indikator yakni pengetahuan, tanggapan, dan harapan, diketahui bahwa persepsi Kepala SMA Negeri terhadap fungsi Dewan Pendidikan di Kota Bandar Lampung adalah Negatif. Ini terlihat bahwa meskipun kepala sekolah mengetahui adanya Dewan Pendidikan dan fungsinya. Namun, ada beberapa aplikasi fungsi Dewan Pendidikan yang dirasa kurang sesuai oleh kepala sekolah. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Pengetahuan

Pada indikator pemahaman terlihat kepala sekolah kurang mengetahui lokasi dan kondisi Dewan Pendidikan, Kepengurusan atau keanggotaan, dan cara menyampaikan aspirasi kepada Dewan pendidikan.

2. Indikator Tanggapan

Hasil analisis pada indikator tanggapan menunjukkan bahwa kepala sekolah kurang setuju dengan pelaksanaan fungsi Dewan Pendidikan dikarenakan Dewan Pendidikan kurang melibatkan Kepala sekolah saat menjalankan fungsinya. Keberadaan Dewan Pendidikan juga tidak membantu kepala sekolah dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan. Selain itu, kepala sekolah kurang setuju apabila Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan

pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan luaran pendidikan apabila kenyataan kinerja Dewan Pendidikan masih seperti ini.

3. Indikator Harapan

Setalah dilakukan analisis dan pembahasan pada indikator harapan, kepala sekolah menyatakan bahwa Dewan Pendidikan perlu memiliki media sosial seperti facebook, twitter, dan web guna menunjang keterlaksanaan fungsi Dewan Pendidikan. Kepala sekolah juga menyatakan bahwa pengurus Dewan Pendidikan perlu memiliki jadwal terstruktur sehingga sekretariat Dewan Pendidikan dirasakan manfaat keberadaannya oleh masyarakat . hal terpenting setelah Dewan Pendidikan berfungsi dengan semestinya, kepala sekolah merasa dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan setidaknya setiap satu semester sekali.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian, menganalisis dan mengambil kesimpulan, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Pendidikan

Melalui analisis permasalahan dan kesimpulan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Dewan Pendidikan supaya fungsinya bisa berjalan dengan baik. diantaranya:

a. Perlu adanya media yang saat ini familiar di masyarakat seperti facebook,
 twiter, dan web untuk mempermudah akses masyarakat dalam
 berpartisipasi serta beraspirasi terhadap pendidikan

- b. Mengenai sekretariat yang ada saat ini di kebun Jahe tanjung Karang, bisa lebih dimanfaatkan lagi untuk melaksanakan aktifvitas. Jika memang tidak bisa aktif setiap hari, setidaknya ada jadwal terstruktur sehingga masyarakat bisa menyampaikan aspirasi atau melaksanakan kepentingan lainnya secara langsung
- c. Pemberian surat edaran keanggotaan Dewan Pendidikan ke kepala sekolah sehingga kepala sekolah mengetahui pengurus Dewan Pendidikan yang saat ini menjabat
- d. Melibatkan kepala sekolah seperti rapat saat menjalankan fungsinya apabila keterlaksanaan fungsi tersebut mengharuskan keterlibatan kepala sekolah, serta lebih berkomunikasi dengan kepala sekolah sehingga Dewan Pendidikan mengetahui apa yang terjadi di sekolah demi tercapainya pendidikan yang bermutu
- e. Jangka waktu dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan hasil pendidikan minimal dilaksanakan setiap satu semester sekali.

2. Kepada Pemerintah

Pemerintah sudah semestinya meninjau kembali keberadaan Dewan Pendidikan, bagaimana kinerja keanggotaannya selama ini apakah sudah sesuai dengan fungsi yang seharusnya dijalankan ataukah Dewan Pendidikan ini ada hanya sekedar formalitas, jika memang Dewan Pendidikan memerlukan sekretariat yang layak atau lebih dari baik yang sekarang pemerintah hendaknya bisa memfasilitasinya. Apabila hak dari pemerintah kepada Dewan

pendidikan sudah dipenuhi dan dewan Pendidikan masih seperti ini, Pemerintah bisa memberikan surat peringatan kepada Dewan Pendidikan.

3. Kepada Kepala Sekolah

Melihat pelaksanaan fungsi Dewan Pendidikan yang masih seperti ini, kepala sekolah bisa membahasnya melalui rapat dan kajian terkait Dewan Pendidikan di MKKS. Hasil kajian dan temuan fakta terkait Dewan Pendidikan bisa disampaikan kepada Dewan Pendidikan untuk lebih memperbaikai kinerja atau bisa disampaikan langsung kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi keterlaksanaan dewan Pendidikan. Mengingat pelaksanaan fungsi Dewan Pendidikan belum maksimal, Kepala sekolah bisa mengambil alih fungsi Dewan Pendidikan melalui kerja sama dengan komite sekolah menghimpun aspirasi, ide, dan tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat dan menyalurkannya kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, H.M. 2006. Administrasi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta
- Haenilah, EY. 2008. Dasar-dasar Kurikulum. Bandarlampung: Unila
- Hamdi, Asep Saepul. 2014. Metode Penelitian Kuatitatif Aplikasi dalam Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish
- Hendarman.2012."Peran Dewan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan".Badan Penelitian dan Pengembangan kemendikbud Vol 18, No 1 http://litbang.kemdikbud.go.id/jurnaldikbud/index.php/jpnk/article/view/ 67, 27 April 2016
- Imtima.2007. Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bandung: Grasindo
- Jelantik, K. 2015. Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional.DIY:CV Budi Utama
- Junsu.2013. "Definisi Respon Menurut Para Ahli". Data Sosiologi.http://junsu.blog.fisip.uns.ac.id/2013/06/20/definisi-responsmenurut-para-ahli/ (diakses pada 27 April 2016).
- Notoatmodjo, S. 2007. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
- Pora, Yusran. 2004. Selamat Tinggal sekolah. Yogyakarta: Pressindo
- Rahman, dkk. 2006. *Peran Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Alqaprint.
- Republik Indonesia. UUD 1945, Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia.2003. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia.2007.PERMENDIKNAS nomor 17 tahun 2007 tentang Standar kepala Sekolah/Madrasah, Secretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia.2010. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah. Sekretariat Negara. Jakarta

- Republik Indonesia.2010. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan pendidikan. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sarwono, S.W. 1994. Psikologi Lingkungan Jakarta: Grasindo
- Sarwono, Sarlito W. 2009. Pengantar Psikologi Umum. Depok: Raja Wali Pers.
- Septian, Viki. 2014. persepsi kepala sekolah terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMA Negeri se-Kota Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015 (Skripsi)
- Sugiyono.2010.Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatiff, dan R&B.Bandung: Alfabeta
- Sunaryo. 2004. Psikologi untuk Keperawatan Jakarta:EGC.
- Walgito, Bimo, 2010. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta: Andi Ofset